Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8 Issue 2, Desember 2026 (170-177)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33724

TATA KELOLA SMART VILLAGE KOLABORATIF UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI

Adli Lukman[1]*, Muhammad Rais Rahmat Razak[1], Muliani, S.[1], Nurjannah Noncy[1], Uli Nuha[1]

[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia.
*Corresponding author: adlyep@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received : 16-07-2026
Revised : 01-08-2026
Accepted : 27-08-2026
Published : 15-12-2026

Keywords:
Collaborative Governance, Kawasan Transmigrasi, Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Smart Village, Tata Kelola Desa.

ABSTRACT
Transformasi digital membuka peluang peningkatan kualitas tata kelola dan ekonomi perdesaan melalui konsep Smart Village. Pada kawasan transmigrasi, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas kelembagaan, literasi digital masyarakat, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Smart Village berbasis Collaborative Governance serta merumuskan model tata kelola untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan transmigrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif di kawasan transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan yang dipilih secara purposif, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara tematik dengan bantuan NVivo. Analisis mengidentifikasi empat tema empiris, yaitu transformasi tata kelola pemerintahan digital, kolaborasi multipihak, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Keempat tema tersebut disintesiskan menjadi model konseptual yang memuat lima komponen: Smart Governance, Collaborative Governance, Capacity Building, Local Economic Empowerment, dan Sustainable Economic Growth. Temuan menunjukkan bahwa teknologi digital berfungsi sebagai instrumen pendukung, sedangkan kolaborasi multipihak menjadi mekanisme yang menghubungkan penguatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Model yang dihasilkan menawarkan kerangka konseptual untuk pengembangan Smart Village pada kawasan transmigrasi. Karena disusun dari studi eksploratif dengan lima informan di satu kabupaten, model ini masih memerlukan pengujian pada konteks wilayah dan aktor yang lebih beragam.

PENDAHULUAN

Transformasi digital mendorong perubahan dalam pembangunan perdesaan melalui tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Dalam kerangka ini, konsep Smart Village mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, inovasi ekonomi, serta pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan (Marini Govigli et al., 2022; Yin et al., 2024; Zavratnik et al., 2018). Pendekatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi desa, memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Agenda pembangunan perdesaan juga berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, inovasi, dan penguatan kelembagaan (OECD, 2020; United Nations, n.d.).

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8 Issue 2, Desember 2026 (170-177)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33724

Di Indonesia, pembangunan kawasan transmigrasi merupakan salah satu kebijakan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan transmigrasi diarahkan menjadi kawasan ekonomi produktif dengan mengoptimalkan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, n.d.; Martindale, 2021). Dalam praktiknya, pengembangan kawasan tersebut masih menghadapi tantangan tata kelola, keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas kelembagaan, literasi digital masyarakat, dan koordinasi antaraktor. Tantangan tersebut dapat membatasi pemanfaatan potensi lokal dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (Dlamini & Vilakati, 2021; Pratiwi et al., 2022).

Implementasi Smart Village menjadi salah satu pendekatan untuk merespons tantangan tersebut melalui digitalisasi pemerintahan desa, penguatan sistem informasi, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi. Studi tentang transformasi desa digital di Indonesia menunjukkan bahwa proses tersebut melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melalui mekanisme co-production (Susanti et al., 2023). Namun, digitalisasi layanan dan penyediaan infrastruktur belum dengan sendirinya menjamin penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Karena itu, keberhasilan transformasi digital juga bergantung pada kemampuan para aktor membangun kolaborasi yang efektif (Adamowicz & Zwolinska-Ligaj, 2020; Santoso et al., 2026).

Perspektif Collaborative Governance menekankan bahwa penyelesaian persoalan publik memerlukan interaksi antarpemangku kepentingan melalui dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pengambilan keputusan partisipatif (Ansell & Gash, 2008). Kerangka integratif Emerson et al. (2012) juga menempatkan dinamika kolaborasi, tindakan bersama, dan kapasitas aksi kolektif sebagai unsur penting dalam tata kelola kolaboratif. Dalam konteks kawasan transmigrasi, pendekatan ini relevan karena pembangunan melibatkan aktor dengan kepentingan dan sumber daya yang beragam. Studi Smart Village di Indonesia juga menekankan pentingnya jejaring kolaborasi untuk menyelaraskan kapasitas aktor, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat (Roidatua & Purbantara, 2022; Santoso et al., 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan Smart Village dengan tata kelola dan pembangunan ekonomi desa. Aziiza dan Susanto (2020) mengembangkan model Smart Village untuk wilayah perdesaan melalui studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. Endriyono et al. (2024) menemukan bahwa dimensi Smart Economy dan Smart Society berpengaruh positif terhadap indeks Smart Village di Provinsi Lampung. Roidatua dan Purbantara (2022) menunjukkan bahwa pengembangan Smart Village memerlukan keterlibatan kementerian/lembaga, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam penyediaan infrastruktur, integrasi aplikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Susanti et al. (2023) mengembangkan model co-production transformasi desa digital yang menempatkan pemerintah, sektor swasta, dan warga sebagai aktor dalam proses perubahan.

Hasil telaah terhadap penelitian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum banyak dikaji. Pertama, studi Smart Village banyak membahas digitalisasi pelayanan, tata kelola desa, atau pengembangan ekonomi secara umum. Kedua, kajian Collaborative Governance pada Smart Village belum secara khusus menjelaskan bagaimana kolaborasi multipihak menghubungkan transformasi digital dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Ketiga, studi mengenai transmigrasi lebih sering menelaah kebijakan, jaringan sosial, atau kondisi sosial-ekonomi, sedangkan integrasi tata kelola digital, kolaborasi multipihak, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam satu model masih perlu diperdalam (Pratiwi et al., 2022). Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk merumuskan model tata kelola yang mempertimbangkan karakteristik kelembagaan dan aktor di kawasan transmigrasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Smart Village berbasis Collaborative Governance dan merumuskan

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8 Issue 2, Desember 2026 (170-177)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33724

model tata kelola yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada kawasan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis lima komponen—Smart Governance, Collaborative Governance, Capacity Building, Local Economic Empowerment, dan Sustainable Economic Growth—dalam satu kerangka konseptual. Dalam model ini, kolaborasi multipihak ditempatkan sebagai mekanisme penghubung antara transformasi digital, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Model yang dihasilkan diharapkan memperkaya kajian administrasi publik dan memberi masukan bagi perumusan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif (Ellis & Hart, 2023) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Smart Village berbasis Collaborative Governance dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan transmigrasi (Zhang & Zhang, 2020). Penelitian dilaksanakan di kawasan transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal, penerapan inovasi pemerintahan desa, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan.

Informan penelitian berjumlah lima orang dan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan kawasan transmigrasi. Informan mewakili unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola kawasan transmigrasi, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan pembangunan, serta dokumen pendukung lainnya. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis mencakup enam tahap: familiarisasi dengan data, penyusunan kode awal (initial coding), identifikasi tema, peninjauan dan penyempurnaan tema, pendefinisian serta penamaan tema, dan penyusunan laporan analisis. Pengelolaan dan pengodean data dibantu oleh NVivo untuk menelusuri pola dan hubungan antartema. Peneliti juga menjalankan Word Frequency Query pada NVivo untuk mengidentifikasi kata/frasa yang paling sering muncul; sepuluh kata/frasa dengan frekuensi tertinggi disajikan pada Tabel 1. Kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi, member checking, peer debriefing, dan penyusunan audit trail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dianalisis melalui pengodean awal (initial coding), pengelompokan kategori, pembentukan tema, dan interpretasi hubungan antartema dengan bantuan NVivo. Analisis terhadap wawancara mendalam, observasi, dan dokumen mengidentifikasi empat tema empiris: (1) transformasi tata kelola pemerintahan digital; (2) penguatan kolaborasi multipihak; (3) pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal; dan (4) penguatan kapasitas kelembagaan desa. Keempat tema tersebut menjadi dasar sintesis model tata kelola Smart Village berbasis Collaborative Governance.

Tabel 1. Sepuluh Kata/Frasa dengan Frekuensi Tertinggi dalam Data Penelitian

No.	Kata/Frasa Dominan	Frekuensi Kemunculan	Persentase (%)	Interpretasi Temuan
1	Collaborative Governance	56	15,8	Menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan tema yang paling dominan dalam implementasi Smart Village pada kawasan transmigrasi.
2	Smart Village	48	13,5	Menggambarkan pentingnya transformasi digital desa sebagai pendekatan utama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan kawasan.

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8 Issue 2, Desember 2026 (170-177)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33724

No.	Kata/Frasa Dominan	Frekuensi Kemunculan	Persentase (%)	Interpretasi Temuan
3	BUMDes	41	11,5	Menunjukkan peran strategis BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal, fasilitator usaha masyarakat, dan mitra pemerintah desa.
4	Kolaborasi	38	10,7	Menggambarkan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
5	Ekonomi	36	10,1	Menunjukkan fokus penelitian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
6	Digital	33	9,3	Mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi instrumen utama dalam pelayanan publik dan pengembangan ekonomi desa.
7	Partisipasi	29	8,2	Menggambarkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.
8	Pelayanan	27	7,6	Menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem administrasi dan layanan berbasis digital.
9	Pemerintah Desa	24	6,8	Menggambarkan peran pemerintah desa sebagai aktor utama dalam mengoordinasikan implementasi Smart Village berbasis Collaborative Governance.
10	Masyarakat	23	6,5	Menunjukkan bahwa masyarakat menjadi subjek sekaligus penerima manfaat utama dari implementasi Smart Village dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Total		**355**	**100,0**	Hasil Word Frequency Query menunjukkan bahwa tema kolaborasi, digitalisasi dan pemberdayaan ekonomi merupakan isu yang paling dominan dalam hasil wawancara

Sumber: Hasil analisis data penelitian menggunakan NVivo.

1. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa di kawasan transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah mulai menerapkan berbagai inovasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti pemanfaatan Sistem Informasi Desa, digitalisasi administrasi kependudukan, pelayanan surat-menyurat secara elektronik, serta penyebaran informasi pembangunan melalui media sosial desa. Implementasi tersebut meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.

Salah seorang informan menyampaikan:

"Pelayanan administrasi sekarang lebih cepat dibanding sebelumnya karena sebagian sudah menggunakan aplikasi desa. Masyarakat tidak lagi harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan." (Informan 1)

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa digitalisasi belum berjalan secara optimal akibat adanya keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat serta belum terintegrasinya sistem informasi antarinstansi. Oleh karena itu transformasi digital masih memerlukan penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

2. Penguatan Collaborative Governance

Tema kedua berkaitan dengan praktik Collaborative Governance. Hasil pengodean NVivo menunjukkan keterlibatan pemerintah desa sebagai koordinator, sementara pemerintah daerah, pengelola kawasan transmigrasi, BUMDes, kelompok tani, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Smart Village memerlukan koordinasi lintas aktor.

Informan menyatakan:

"Pembangunan desa tidak bisa hanya dilakukan pemerintah desa. Kami selalu melibatkan BUMDes, kelompok tani, tokoh

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8 Issue 2, Desember 2026 (170-177)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33724

masyarakat, dan pendamping desa dalam menyusun program pembangunan." (Informan 2)

Walaupun kolaborasi telah berlangsung, koordinasi lintas sektor masih cenderung informal dan belum didukung mekanisme kerja yang baku. Kondisi ini menyebabkan sejumlah program pembangunan belum terintegrasi secara optimal.

3. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Kawasan transmigrasi memiliki potensi ekonomi pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro. Berdasarkan hasil wawancara, pemanfaatan Smart Village mulai diarahkan untuk promosi produk lokal, pemasaran digital, dan penyebaran informasi harga komoditas. BUMDes juga mulai menjalankan fungsi sebagai fasilitator kegiatan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengurus BUMDes:

"Kami telah memulai memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan produk masyarakat yang telah ada. Walaupun memang produk tersebut belum secara maksimal, hasilnya mulai terlihat karena jangkauan pasar menjadi lebih luas dengan adanya penggunaan media digital seperti watshapp, tiktok dan facebook." (Informan 3)

Meskipun demikian, keterbatasan keterampilan pemasaran digital dan minimnya pendampingan usaha masih menghambat upaya peningkatan daya saing produk lokal.

4. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa

Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi Smart Village. Pemerintah desa secara bertahap meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknologi informasi, pengelolaan data desa, dan penyusunan perencanaan pembangunan berbasis data.

Seorang aparat desa menjelaskan:

"Pelatihan yang kami ikuti benar-benar sangat membantu dalam mengelola data desa dan pelayanan masyarakat, akan tetapi masih diperlukan pendampingan yang lebih intens agar semua perangkat desa memiliki kemampuan dan pemahaman yang sama." (Informan 4)

Selain peningkatan kompetensi aparatur, penelitian menemukan adanya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Keterlibatan tersebut memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Orientasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Keempat tema empiris tersebut menunjukkan bahwa penerapan Smart Village diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sintesis hasil wawancara memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi, kolaborasi antarpemangku kepentingan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan transmigrasi.

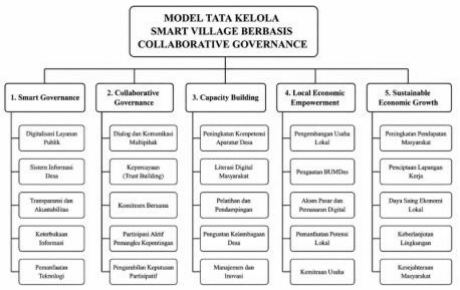
Seorang tokoh masyarakat menyampaikan:

"Kalau semua pihak mau bekerja bersama dan teknologi dimanfaatkan dengan baik mungkin, tentunya masyarakat akan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya dan ekonomi desa akan semakin berkembang." (Informan 5)

Sintesis Model Tata Kelola Smart Village Berbasis Collaborative Governance

Keempat tema empiris tersebut disintesiskan dalam Model Tata Kelola Smart Village Berbasis Collaborative Governance. Model ini memuat lima komponen yang saling berkaitan, yaitu Smart Governance, Collaborative Governance, Capacity Building, Local Economic Empowerment, dan Sustainable Economic Growth. Collaborative Governance ditempatkan sebagai mekanisme penghubung yang mengintegrasikan tata kelola digital, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Model ini merupakan sintesis konseptual dari temuan studi eksploratif dan belum diuji sebagai model implementasi pada konteks wilayah lain.

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8 Issue 2, Desember 2026 (170-177)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33724



Gambar 1. Model Tata Kelola Smart Village Berbasis Collaborative Governance

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Smart Village di kawasan transmigrasi Kabupaten Sidrap tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi digital, tetapi juga pada kualitas tata kelola kolaboratif yang menghubungkan pemerintah desa, pemerintah daerah, BUMDes, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan aktor pembangunan lainnya. Dalam konteks ini, teknologi digital berfungsi sebagai instrumen pendukung, sedangkan Collaborative Governance menyediakan mekanisme untuk mengoordinasikan sumber daya, kepentingan, dan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, transformasi digital memerlukan koordinasi, kepercayaan, komunikasi, dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan kerangka Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008), yang menekankan dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil antara. Kerangka integratif Emerson et al. (2012) juga menekankan pentingnya dinamika kolaborasi dan kapasitas aksi bersama. Di Kabupaten Sidrap, keterlibatan pemerintah desa, pemerintah daerah, pengelola kawasan transmigrasi, BUMDes, kelompok tani, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat menunjukkan adanya jejaring multipihak. Namun, koordinasi yang masih informal mengindikasikan perlunya aturan kerja dan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas agar kolaborasi dapat berjalan konsisten.

Pada dimensi tata kelola digital, pemanfaatan Sistem Informasi Desa, administrasi digital, dan kanal informasi daring dinilai mempermudah pelayanan dan akses informasi. Temuan ini sejalan dengan studi Smart Village yang menempatkan teknologi sebagai sarana peningkatan layanan publik dan kapasitas tata kelola (Aziiza & Susanto, 2020; Santoso et al., 2026). Meski demikian, keterbatasan jaringan internet, literasi digital, dan integrasi sistem menunjukkan bahwa investasi teknologi perlu disertai penguatan kompetensi aparatur dan kelembagaan desa. Temuan tersebut juga selaras dengan kajian transformasi desa digital yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan warga dalam proses co-production (Susanti et al., 2023).

Pada aspek pemberdayaan ekonomi, temuan menunjukkan bahwa BUMDes mulai memanfaatkan media digital untuk memperluas promosi produk dan akses pasar. Hasil ini sejalan dengan Endriyono et al. (2024), yang menemukan bahwa dimensi Smart Economy dan Smart Society berpengaruh positif terhadap indeks Smart Village. Penelitian ini menambahkan bahwa pengembangan ekonomi lokal juga bergantung pada pendampingan usaha, jaringan pemasaran, dan kemitraan dengan kelompok tani. Karena itu, pemanfaatan teknologi perlu diintegrasikan dengan dukungan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha.

Penguatan kapasitas kelembagaan terlihat melalui pelatihan aparatur, pengelolaan data, dan perencanaan berbasis data. Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa transformasi desa digital tidak dapat dipisahkan dari kemampuan organisasi dan warga untuk mengadopsi teknologi serta berpartisipasi dalam proses pembangunan (Roidatua & Purbantara, 2022; Susanti et al., 2023). Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa perlu ditopang oleh mekanisme yang lebih terstruktur agar masukan warga berpengaruh pada keputusan dan program pembangunan.

Dalam konteks kawasan transmigrasi, jejaring sosial dan hubungan antaraktor turut memengaruhi pertukaran pengetahuan serta pengelolaan sumber daya lokal. Pratiwi et al. (2022) menunjukkan bahwa posisi transmigran dan penduduk lokal dalam jaringan pengetahuan komunitas dapat membentuk pola pertukaran pengetahuan di wilayah perdesaan. Dalam penelitian ini, Collaborative Governance diposisikan sebagai mekanisme yang

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8 Issue 2, Desember 2026 (170-177)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33724

menghubungkan transformasi digital, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi. Model yang dikembangkan menyatukan lima komponen tersebut dalam satu kerangka konseptual, tetapi efektivitasnya masih perlu diuji pada wilayah dan aktor yang lebih beragam.

Temuan mengenai kolaborasi multipihak sejalan dengan Roidatua dan Purbantara (2022), yang menunjukkan bahwa pengembangan Smart Village memerlukan keterlibatan kementerian/lembaga, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Penelitian ini memperluas pembahasan tersebut dengan menempatkan kolaborasi sebagai mekanisme yang menghubungkan tata kelola digital, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penempatan Collaborative Governance sebagai mekanisme penghubung antara transformasi digital, kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Integrasi tersebut memperluas pembahasan Smart Village dari penggunaan teknologi menuju tata kelola multipihak yang berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan transmigrasi.

Secara praktis, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa perlu menyelaraskan penguatan infrastruktur digital dengan peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan BUMDes dan UMKM, pendampingan pemasaran digital, serta pembentukan forum koordinasi lintas aktor. Prioritas pelaksanaan perlu disesuaikan dengan potensi ekonomi dan kapasitas kelembagaan masing-masing kawasan transmigrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Smart Village di kawasan transmigrasi Kabupaten Sidrap berkaitan dengan empat tema empiris, yaitu transformasi tata kelola pemerintahan digital, penguatan kolaborasi multipihak, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Keempat tema tersebut disintesiskan dalam model konseptual lima komponen—Smart Governance, Collaborative Governance, Capacity Building, Local Economic Empowerment, dan Sustainable Economic Growth—dengan Collaborative Governance sebagai mekanisme penghubung. Temuan mengindikasikan bahwa teknologi digital perlu didukung infrastruktur, kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan agar dapat memperkuat pelayanan publik dan ekonomi lokal. Implikasi kebijakannya mencakup penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi dan kapasitas aparatur, pengembangan BUMDes dan UMKM, serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas aktor. Karena penelitian ini dilakukan pada satu kawasan transmigrasi dengan lima informan, model yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan perlu diuji pada wilayah serta aktor yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Adamowicz, M., & Zwolińska-Ligaj, M. (2020). The “Smart Village” as a way to achieve sustainable development in rural areas of Poland. *Sustainability, 12*(16), 6503. https://doi.org/10.3390/su12166503

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Aziiza, A. A., & Susanto, T. D. (2020). The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 722*(1), 012011. https://doi.org/10.1088/1757-899X/722/1/012011

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Dlamini, T., & Vilakati, S. (2021). Remote and rural connectivity: Infrastructure and resource sharing principles. *Wireless Communications and Mobile Computing, 2021*, Article 6065119. https://doi.org/10.1155/2021/6065119

Ellis, J. L., & Hart, D. L. (2023). Strengthening the choice for a generic qualitative research design. *The Qualitative Report, 28*(6), 1759–1768. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.5474

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative

Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Volume 8 Issue 2, Desember 2026 (170-177)
ISSN Online: 2685-3582
https://doi.org/10.14710/dialogue.v8i2.33724

governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Endriyono, Gunarto, T., & Yuliawan, D. (2024). Village economic progress: Exploring the impact of the Smart Village Program in Lampung Province 2020–2024. *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship, 7*(2), 122–133. https://doi.org/10.23960/ijebe.v7i2.291

Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. (n.d.). Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Retrieved July 7, 2026, from https://www.transmigrasi.go.id/

Marini Govigli, V., Rois-Díaz, M., den Herder, M., Bryce, R., Tuomasjukka, D., & Górriz-Mifsud, E. (2022). The green side of social innovation: Using sustainable development goals to classify environmental impacts of rural grassroots initiatives. *Environmental Policy and Governance, 32*(6), 459–477. https://doi.org/10.1002/eet.2019

Martindale, L. (2021). From land consolidation and food safety to Taobao villages and alternative food networks: Four components of China's dynamic agri-rural innovation system. *Journal of Rural Studies, 82*, 404–416. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.012

OECD. (2020). Rural well-being: Geography of opportunities. *OECD Publishing*. https://doi.org/10.1787/d25cef80-en

Pratiwi, A., Matous, P., & Martinus, K. (2022). Transmigration programs and migrant positions in rural community knowledge networks. *Journal of Rural Studies, 95*, 391–401. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.09.019

Roidatua, M. R., & Purbantara, A. (2022). Collaborative governance in developing Smart Village. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Rural Socio-Economic Transformation*: Agrarian, Ecology, Communication and Community Development Perspectives (RUSET 2021). EAI. https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2021.2317180

Santoso, B., Widodo, S. P., Bramuda, M. Y., & Wardiyanto, B. (2026). Collaborative governance analysis in the implementation of the Smart Village Program in Banyuwangi Regency. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, 12*(1), 138–153. https://doi.org/10.29103/jsds.v12i1.25792

Susanti, E., Harta, R., Diana, B. A., & Utami, S. B. (2023). A co-production model of digital village transformation in Indonesia. *Public Policy and Administration, 22*(4), 488–502. https://doi.org/10.13165/VPA-23-22-4-08

United Nations. (n.d.). The 17 goals. https://sdgs.un.org/goals

Yin, S., Li, Y., Chen, X., Yamaka, W., & Liu, J. (2024). Collaborative digital governance for sustainable rural development in China: An evolutionary game approach. *Agriculture, 14*(9), 1535. https://doi.org/10.3390/agriculture14091535

Zavratnik, V., Kos, A., & Duh, E. S. (2018). Smart villages: Comprehensive review of initiatives and practices. *Sustainability, 10*(7), 2559. https://doi.org/10.3390/su10072559

Zhang, X., & Zhang, Z. (2020). How do smart villages become a way to achieve sustainable development in rural areas? Smart village planning and practices in China. *Sustainability, 12*(24), 10510. https://doi.org/10.3390/su122410510